

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Enembe, Lukas, 2016, *PAPUA antara Uang dan Kewenangan cetakan I*, PT. Wahana Semesta Intermedia, Jakarta
- Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, 2000, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Gozali, Djoni Sumardi, 2018, *Hukum Pengadaan Tanah*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta
- Gunanegara, 2008, *Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, PT. Tatanusa, Jakarta
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Edisi 2008, PT. Penerbit Djambatan, Jakarta
- Muliawan, Jarot Widya, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, 2016, Buku Litera, Yogyakarta
- Poerwowidagdo, Judo, *Strategi Pemberdayaan Untuk Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat*, 1999, Yogyakarta
- Sarjita, "Teknik & Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan", 2005, TuguJogja, Yogyakarta
- Sembiring, Rosnidar, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Cetakan Pertama, PT. Rajagrafindo persada, Jakarta
- Salle , H. Aminuddin, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Cetakan pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta
- Sumardjono, Maria S.W., 2015, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Maria S.W Sumardjono, 2018, "Pluralisme Hukum, Sumber Daya Alam dan Keadilan Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat", Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Rusmadi Murad, 2007, *Menyikapi Tabir Masalah Pertanahan*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Usman, Rashmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, 2001, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

## **B. Artikel, Jurnal, Tesis, Disertasi**

Amahorseya, Ronald, Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi Kasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire), *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, 2008

Ambarsari, Ningrum, “Urgensi Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Investor Di Provinsi Papua (Jayapura)”, *Jurnal*, Universitas Hasanuddin. 2017

Arifin, Zainal, “Mekanisme Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kabupaten Probolinggo Jawa Timur), *Skripsi*, Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2017

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura, Distrik Sentani Timur Dalam Angka, *Jurnal*, Tabel 1.2 Luas Wilayah. 2016

Bagindo, Irma. “Analisa Permasalahan Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Kanal Banjir Timur Di Kelurahan Cipinang Muara Kota Administrasi Jakarta Timur, *Tesis*, Prodi M.kn Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2011

Direktorat Jenderal Kelautan, Petunjuk Teknis Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, *Jurnal*, 2013

Fatahilaha, Qodli Zaka, “Pemberian Ganti Rugi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) ( Studi Kasus Pengadaan Tanah Di Desa Jetis Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul), *Skripsi*, Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012

Fitriani, Rika, “Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum UUPA (Studi Kasus Pembuatan Tol Sumatera di Wilayah Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan)”, *Tesis*, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018

Firdaus, Tomi, “Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Lubuk Kilangan-Bungus Teluk Kabung Kota Padang, *Tesis*, Prodi M.kn Fakultas Hukum Andalas, Padang, 2017

- Florenshia, "Tinjauan Yuridis Ganti Kerugian Atas Hak Milik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kecamatan Medang Deras, *Jurnal*, Prodi, Kekhususan Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2016
- Hamdi, Penyelesaian Sengketa Penetapan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, *Jurnal*, 2014, Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram
- Herewilla, Paula Mustika Dewi, Pengalihan Hak Tanah Ulayat Pada Bandar Udara Sentani di Jayapura Papua, *Tesis*, Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011
- Ikatan Mahasiswa Timur, Waktu Indonesia Timur, *Jurnal*, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta, 2013, hlm, 24
- M. Ondikeleuw, Herry Peran Kelembagaan Adat Dalam Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Di Kota Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, 2016, *Jurnal*, hlm188
- Marthen, Fadly, "itu Kitorang Pu Tanah" Melihat Klaim Sengketa Tanah Pada Orang Kayu Batu dan Kayu Pulo di Kota Jayapura, *Tesis*, Program Studi Ilmu Pascasarjana Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 2012
- Mulyadi, Tri, Jual Beli Tanah Hak Ulayat Dengan Pelepasan Adat Sebagai Syarat Pendaftaran Tanah Pada Suku Tobatdji Enj'ros di Kota Jayapura Papua, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang. 2010
- Oprasi, Agus, "Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Hak Atas Tanah Yang Terkena Proyek Pembangunan Water Front City Di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, *Tesis*, Prodi M.kn, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,2010
- Pabassing, Yulianus, Kepastian Hukum Ganti kerugian Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Untuk Pembangunan, *Disertasi*, Program Studi Ilmu Hukum,Pascasarjana Universitas Hasanuddin. 2017
- Sarjita, Strategi Mengelola Sengketa Pertanahan, *Jurnal*, Mimbar Hukum ISSN 0852-100 X No.48/X/2004
- Seminar Laporan Akhir Sementara, Karakteristik Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah di Papua Dalam Rangka Tertib Administrasi Pertanahan, Pusat Penelitian dan Pengembangan

Badan Pertanahan Nasional RI, *Jurnal*, Hotel Grand Cemara,  
Jakarta, 8 November 2013

Sumardjono, Maria S.W, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, *Bahan Kuliah*  
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014

Wirawan, Ervan, “Konflik Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol  
Jombang-Mojokerto (Studi Desa Watudakon Kabupaten  
Jombang)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu  
Sosial dan Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, 2018

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-  
Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi  
Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi  
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang  
Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012  
tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung  
Penyelenggaraan Pengadaan Bagi Pembangunan Untuk  
Kepentingan Umum yang Bersumber Dari Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.02/2013  
tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung  
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk  
Kepentingan Umum yang Bersumber Dari Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah

#### **D. Internet**

<https://www.ceposonline.com/2019/04/05/suku-wally-ancam-palang-stadion-papua-bangkit/> diakses pada tanggal 07 Oktober 2019 pukul 12.00 WIB

<https://www.pasificpos.com/item/30821-pemprov-panggil-pemilih-hak-ulayat-selesaikan-lahan-stadion-papua-bangkit> diakses pada 23 November 2019 Pukul 02.00 WIB

<https://regional.kompas.com/read/2016/04/01/08090091/Ganti.Rugi.Lahan.Stadion.Utama.PON.Papua.Suku.Puhiri.Tuntut.Rp.400.Miliar> diakses pada tanggal 07 Oktober 2019 pukul 11:47 WIB

<https://kumparan.com/bumi-papua/warga-ohee-minta-pembayaran-stadion-untuk-pon-di-papua-1545915284682994213> diakses pada tanggal 07 Oktober 2019 pukul 11:51 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aa730635e92e/apakah-mengalihkan-tanah-yang-digelapkan-termasuk-pencucian-uang/> diakses pada tanggal 27 November 2019 Pukul 02:00 WIB

<https://www.kompasiana.com/rickpapua/54f7ca35a33311d4178b490c/pemalangan-bukan-solusi-baik> diakses pada tanggal 30 November 2019 Pukul 13.00 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/> diakses pada tanggal 13 November 2019 pukul 22.20 WIB

<https://www.pu.go.id/berita/view/16003/komisi-v-dpr-ri-tinjau-kesiapan-infrastruktur-pendukung-pelaksanaan-pon-xx-tahun-2020-di-papua> diakses pada tanggal 11 September 2019, pukul 17.25 WIB